

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai: Latar belakang masalah; Perumusan dan pembatasan masalah; Penjelasan istilah; Pertanyaan penelitian; Tujuan penelitian; Manfaat penelitian; dan Sistematika isi laporan.

A. Latar Belakang Masalah

Masalah besar dalam dunia pendidikan di Indonesia ialah berkenaan dengan kualitas pendidikan yang rendah jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara lain sesama negara berkembang, hal ini berhubungan dengan efektivitas dan relevansi pendidikan. Masalah efektivitas pendidikan terkait dengan proses pendidikan sedangkan relevansi pendidikan berhubungan dengan kesesuaian pendidikan dengan minat siswa, kebutuhan masyarakat/orang tua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejalan dengan bergulirnya sistem pemerintahan dari sistem yang sentralistis ke otonomi daerah yang diikuti dengan disentralisasi pendidikan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, maka terbuka kesempatan kepada setiap daerah dan sekolah untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sehingga sekolah dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan pengembangan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional tahun (2000-2004:227) sebagai berikut:

... Dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat diwujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis memperhatikan ...kebersamaan, kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat .

Untuk mengatasi tantangan pertama diperlukan peningkatan manajemen pendidikan yang berwujud tindakan yang kongkrit sejalan dengan kebijakan yang dianut, yaitu diantaranya dengan mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan manajemen ini memungkinkan sekolah dapat membangkitkan kesadaran orang tua atau wali, masyarakat, pengusaha, dan pemerintah setempat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, memberikan saran, turut mengawasi kegiatan sekolah dan siswanya, sehingga terwujud pendidikan yang sesuai dengan lingkungan dan harapan orang tua. Selanjutnya diperlukan juga kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, kebutuhan daerah dan harapan orang tua yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur dan disiplin dalam segala kegiatan sebagai perwujudan dari penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan salah satu arah pengembangan pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang No. 25 (2000:229) yang mengemukakan perlunya:

“...melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional”.

Khusus berkenaan dengan kebijakan pengembangan kurikulum yang berlaku lokal di Jawa Barat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 melalui kepala Kanwil Depdikbud telah memuai adanya kurikulum muatan lokal, yang berlaku di SD dan SLTP. Hal ini terbukti dengan adanya surat keputusan keputusan kepala kantor wilayah propinsi Jawa Barat No. 979/102/Kep/I/94 tanggal 3 Pebruari 1994 tentang Landasan Program dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal. Dalam kata pengantarnya disebutkan bahwa tujuan disusunnya kurikulum muatan lokal antara lain ialah:

1. Memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, ikut melestarikan budaya, termasuk kerajinan, keterampilan yang nilai ekonominya tinggi di daerah tersebut.
2. Membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat, seandainya mereka tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Membekali siswa agar hidup mandiri, serta dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya .

(Kanwil Depdikbud Jabar, 1994:7)

Dengan adanya kurikulum muatan lokal yang diberlakukan sejak tahun 1994, maka tuntutan yang muncul karenanya ialah berkenaan dengan pelaksanaan di lapangan dan upaya penyempurnaan kurikulum supaya lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan.

Sejalan dengan pembaharuan pendidikan akhir-akhir ini, Depertemen Pendidikan Nasional menggulirkan program Pendidikan Berbasis Luas (BBL) dengan bentuk pendidikan yang disebut *life skill*.

Program ini diberikan kepada SD, SLTP dan SMU serta sekolah kejuruan dalam bentuk pilot proyek. Adapun tujuan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) ialah:

1. Mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat dipergunakan untuk memecahkan problem yang dihadapi.
 2. Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang potensial, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas (*Broad Based Education*).
 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah, dengan mencari peluang pemanfaatan-pemanfaatan sumber daya di masyarakat, sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (*school Based Management*).
- (Depdiknas, 2001).

Beberapa unsur yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kurikulum muatan lokal ialah kepala sekolah, guru, dan peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Kepala sekolah dapat mempengaruhi dan mewarnai iklim sekolah. Kepala sekolah sebagai pengambil keputusan utama di sekolah mempunyai tujuan dan fungsi menciptakan suasana kerja yang sehat dan menyenangkan. Dalam hubungan ini, Soekarto Indrafachrudi dan J.F. Tahalele (1995) mengemukakan fungsi kepemimpinan yang bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

- ...1. Pemimpin berfungsi memikirkan dan merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskannya supaya anggota dapat bekerja sama mencapai tujuan.
2. Pemimpin berfungsi memberi dorongan kepada anggota-anggota kelompok untuk menganalisis situasi supaya dapat dirumuskan rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan baik.
3. Pemimpin berfungsi membantu anggota kelompok dalam mengumpulkan keterangan yang perlu supaya dapat mengadakan pertimbangan yang sehat.
4. Pemimpin berfungsi menggunakan kesanggupan dan minat khusus anggota kelompok.
5. Pemimpin berfungsi memberi dorongan kepada setiap anggota kelompok untuk melahirkan

perasaan dan pikirannya serta memilih buah pikiran yang baik dan berguna dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok. 6. Pemimpin berfungsi memberi kepercayaan dan menyerahkan tanggung jawab kepada anggota dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan kemampuan masing-masing demi kepentingan bersama .
(Soekarto Indrachrudi dkk: 1995:5)

Dalam memainkan peranan dan fungsi di atas, pelaksanaannya dapat berbentuk memberikan kemudahan, memberikan semangat, memberi kepercayaan, mengajak bermusyawarah, menciptakan situasi kerjasama, mengikutsertakan dalam pemecahan masalah dan berbagai bentuk kegiatan lainnya.

Selanjutnya berikut ini fungsi kepemimpinan yang bertalian dengan fungsi menciptakan suasana kerja yang sehat dan menyenangkan.

...1. Pemimpin berfungsi memupuk dan memelihara kebersamaan di dalam kelompok. 2. Pemimpin berfungsi mengusahakan suatu tempat kerja yang menyenangkan, sehingga dapat dipupuk kegembiraan dan semangat kerja dalam pelaksanaan tugas. 3. Pemimpin dapat menanamkan dan memupuk perasaan para anggota bahwa mereka termasuk dalam kelompok dan merupakan bagian dari kelompok. 4. Pemimpin dapat mempergunakan kelebihan yang terdapat pada pemimpin, bukan untuk berkuasa atau mendominasi melainkan untuk memberi sumbangan kepada kelompok menuju pencapaian tujuan bersama .

Berkenaan dengan peranan kepala sekolah selaku pengelola administrasi personalia, khususnya berhubungan dengan pengelolaan guru, maka kepala sekolah mempunyai wewenang memilih pengajar, memberikan tugas, meningkatkan keahlian guru. Dalam hubungan ini Soekarno dkk (1995) mengemukakan bahwa kepala sekolah hendaknya mahir dan cakap dalam hal sebagai berikut:

1. Memilih dan mengangkat guru yang dibutuhkan untuk mengajar suatu kelas, tingkat, atau faktor tertentu;
2. Menciptakan suasana kerja yang harmonis sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai semaksimal mungkin;
3. Memberi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing;
- 4.

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan mutu guru/pendidikan; 5. Memberi pengalaman yang berharga bagi peningkatan mutu guru; 6. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti penataran dan perayaan (olahraga dan kesenian); 7. Mengikuti sertakan guru dalam kegiatan administrasi personalia, misalnya dalam penyeleksian guru baru, perencanaan dan pelaksanaan orientasi dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan.

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah operasional agar pelaksanaan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan lulusan yang diharapkan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kelancaran implementasi kurikulum ialah peranan guru. Guru menempati peranan utama dalam mencapai keberhasilan belajar-mengajar atau belajar siswa. Betapapun baiknya sebuah kurikulum, lengkapnya sarana penunjang belajar-mengajar, biaya cukup tersedia, apabila tidak dilaksanakan oleh guru yang profesional, maka segala kemudahan tersebut akan kurang berarti, bahkan tidak mustahil ketersediaan tersebut akan dimanfaatkan bagi kepentingan yang tidak relevan dengan peningkatan sumber daya manusia. Walaupun disadari bahwa tugas guru merupakan tugas yang berat terutama guru pada Sekolah Dasar, karena tugas guru tidak semata-mata mengajar dan mendidik melainkan juga harus mengerjakan administrasi yang seyogyanya dikerjakan oleh petugas lain. Dalam hubungan ini, R. Ibrahim (1988) mengemukakan "...bahwa tugas dan tanggung jawab guru sangat kompleks, berbagai variabel yang dapat berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan tugas guru".

Dilihat dari peranan guru sebagai pengajar, guru berkewajiban menyusun program pembelajaran, melaksanakan program, melaksanakan evaluasi, belum

lagi apabila guru harus memainkan peranan lainnya seperti pelatih, pendidik, pembimbing, dan berbagai peran kemasyarakatan lainnya. Demikian kompleksitas tugas dan tanggung jawab guru. Hal ini sesuai pula dengan keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.0433/P/1993; No. 25 Tahun 1993 tanggal 24 Desember 1993 dan tanggal 24 Desember 1993. Pada pasal 2 ayat 1 lampiran surat keputusan bersama tersebut di atas dinyatakan sebagai berikut:

...Guru adalah jembatan fungsional dengan tugas utama mengajar pada jalur pendidikan sekolah yang meliputi taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, atau bimbingan pada pendidikan dasar dan menengah. (Deprdikbud, 1996/1997:46)

Selanjutnya pada pasal 3 ayat 1 dikemukakan bahwa tugas pokok guru adalah:

...menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisis hasil evaluasi belajar, serta menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. (Deprdikbud, 1996/1997:46)

Faktor terakhir yang menentukan optimalisasi implementasi kurikulum ialah peran serta masyarakat dalam pendidikan. Pengakuan tentang perlunya peran serta masyarakat hal ini terbukti dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "...bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah". Atas dasar inilah maka muncullah tuntutan bentuk partisipasi, khusus dalam implementasi kurikulum, peran serta itu dapat berupa "...pendanaan, penyediaan tenaga ahli, penyediaan tempat pelaksanaan aktivitas, dan hal-hal lainnya yang menunjang keberhasilan



pelaksanaan program pembelajaran muatan lokal”. Hal ini tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Jawa Barat No. 979/102/Kep/94 tentang Landasan Program dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (SD dan SLTP).

Hal lain yang terkait dalam pengembangan implementasi kurikulum ialah peran orang tua dalam memberikan bimbingan kepada putra/putrinya supaya mereka melakukan kegiatan yang sejalan dengan tuntutan yang tercantum dalam kurikulum. Beberapa bentuk peran serta dalam hal ini ialah berkenaan dengan motivasi belajar siswa, pengarahan siswa untuk senantiasa berbuat baik, memberikan dukungan untuk kelancaran belajar mereka, dan bentuk kegiatan-kegiatan lainnya yang positif.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Implementasi kurikulum pada hakekatnya adalah suatu kegiatan merealisasikan kurikulum dalam kegiatan pendidikan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan perencanaan maupun pelaksanaan pengajaran, evaluasi, bimbingan dan penyuluhan, serta kegiatan pembinaan ketenagaan yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum pada suatu negara/daerah/sekolah tertentu.

Secara rinci, implementasi kurikulum antara lain meliputi: penyusunan program pembelajaran, pelaksanaan program pembelajaran, pelaksanaan evaluasi, pemilihan dan penggunaan alat peraga, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan,

pemilihan dan penggunaan buku sumber, pemilihan materi pelajaran, pemanfaatan sumber, penyusunan materi pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler; pengadaan, pemilihan dan penggunaan alat bantu pengajaran; peningkatan keahlian guru mengajar, penyusunan kalender pendidikan, penyusunan jadwal kegiatan belajar-mengajar, pemberdayaan dan pemanfaatan perpustakaan, analisis hasil evaluasi, penilaian program pengajaran, pelaksanaan dan pelaksanaan pengayaan dan perbaikan, peran serta masyarakat dalam implementasi kurikulum, dan berbagai kegiatan sejenis lainnya. Dalam implementasinya tidak semua kegiatan dapat terlaksana berdiri sendiri, bahkan sebagian besar di antaranya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Unsur-unsur yang terkait dalam penelitian implementasi kurikulum muatan lokal ini ialah guru dan kepala sekolah. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengimplementasikan kurikulum muatan lokal, karena sebagai ujung tombak pembelajaran yang berinteraksi langsung dengan siswa dalam menyampaikan pelajaran, kinerja guru akan berdampak langsung terhadap keberhasilan tujuan pembelajaran. Begitu pula dengan Kepala sekolah, sebagai pemimpin tertinggi dalam pengelolaan sekolah, kepala sekolah memiliki kedudukan serta peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya, ditambah lagi dengan adanya pendelegasian wewenang pusat kepada daerah/sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai tuntutan daerah/masyarakat atau sekolah itu sendiri.



Dalam kaitan upaya mengimplementasikan kurikulum muatan lokal kepala sekolah tidak dapat bekerja sendiri, peran serta pihak lain baik kalangan intern sekolah seperti guru-guru, tata usaha serta siswa maupun kalangan ekstern seperti orang tua siswa maupun masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan implementasi kurikulum muatan lokal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Sejauhmana implementasi kurikulum muatan lokal pada SLTP Negeri Kabupaten Majalengka”.

Adapun masalah utama yang diteliti dalam penelitian ini ialah:

1. Sejauhmana kinerja guru dalam mengimplementasikan kurikulum muatan lokal, meliputi penyusunan program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar siswa, pengayaan dan perbaikan serta bantuan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Hal ini diteliti karena guru berkewajiban mengorganisasi semua aspek dalam kegiatan pembelajaran.
2. Sejauhmana usaha kepala sekolah dalam menunjang implementasi kurikulum muatan lokal, meliputi: pentingnya kurikulum muatan lokal, pengadaan sarana belajar mengajar muatan lokal, pembinaan guru muatan lokal, peningkatan keterampilan mengajar, peningkatan penguasaan materi muatan lokal, serta pemberdayaan masyarakat/orang tua siswa. Penelitian ini dilakukan karena kepala sekolah mempunyai tanggung jawab dalam kelancaran implementasi kurikulum muatan lokal.

3. Adakah hubungan antara kinerja guru dengan usaha kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum muatan lokal.

C. Penjelasan Istilah

Perlu penulis kemukakan, bahwa yang dimaksud dengan penjelasan istilah di sini ialah penjelasan terhadap beberapa istilah sebagaimana tercantum dalam judul karya tulis ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah persepsi dan pengulangan kata-kata yang tidak perlu. Beberapa istilah yang dimaksud ialah:

1. Kinerja Guru

Kinerja guru ialah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh guru sebagai pegawai negeri yang diakui sebagai jabatan fungsional profesional. Beberapa kegiatan tersebut antara lain meliputi:

- Penyusunan program pembelajaran muatan lokal
- Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal
- Penilaian belajar siswa
- Evaluasi hasil belajar siswa
- Penyusunan dan pelaksanaan program pengayaan dan perbaikan
- Membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar muatan lokal

2. Implementasi Kurikulum

Yang dimaksud implementasi kurikulum ialah segala kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengajaran di sekolah, baik yang dilakukan oleh kepala sekolah, dan guru meliputi:

- Penyusunan program pembelajaran
- Pelaksanaan program pembelajaran
- Pemilihan dan penggunaan alat peraga

- Pemilihan dan penggunaan buku sumber
- Pemilihan materi pelajaran
- Penyusunan materi pelajaran
- Pendayagunaan sumber belajar
- Kegiatan ekstra kurikuler
- Pengadaan alat peraga
- Pemilihan alat peraga
- Pengadaan alat bantu pengajaran
- Pemilihan alat bantu pengajaran
- Peningkatan keahlian guru
- Penyusunan kalender pendidikan
- Penyusunan jadwal kegiatan belajar-mengajar
- Peran serta masyarakat dalam implementasi kurikulum
- Evaluasi hasil belajar siswa
- Penilaian proses belajar siswa
- Penilaian program pembelajaran
- Pelaksanaan pengayaan dan perbaikan
- Legalisasi prestasi belajar siswa

3. Kurikulum Muatan Lokal

Yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal ialah mata-mata pelajaran yang diajarkan oleh sekolah sesuai dengan harapan masyarakat dan lingkungan sekolah itu berada. Mata pelajaran muatan lokal di Jawa Barat terdiri dari dua program, yaitu program wajib dan program pilihan. Program wajib yaitu pelajaran

bahasa Sunda artinya ialah bahwa semua Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama wajib mengajarkan pelajaran bahasa Sunda. Sedangkan program pilihan untuk SLTP meliputi:

- Pendidikan keterampilan (anyaman, elektronika, otomotif, keramik, jasa menyetik, jasa pembukuan, jasa komputer, jasa boga, tata busana dan pertanian).
- Kesenian daerah (seni karawitan, seni tari, dan bela diri)
- Bahasa (bahasa Cirebon)

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian teoritis di atas maka dikemukakan rincian masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana kinerja guru dalam mengimplementasikan kurikulum muatan lokal?
 - a. Sejauhmana kemampuan guru dalam menyusun program pembelajaran muatan lokal?
 - b. Sejauhmana kemampuan guru dalam melaksanakan program pembelajaran muatan lokal?
 - c. Sejauhmana kemampuan guru dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa?
 - d. Sejauhmana kinerja guru dalam menyusun dan melaksanakan program pengayaan dan perbaikan?
 - e. Sejauhmana kinerja guru dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar muatan lokal?

2. Sejahteramana usaha Kepala Sekolah dalam menunjang implementasi kurikulum muatan lokal?
 - a. Sejahteramana kepala sekolah menganggap penting kurikulum muatan lokal?
 - b. Sejahteramana usaha kepala sekolah dalam pengadaan sarana belajar-mengajar muatan lokal?
 - c. Sejahteramana usaha kepala sekolah dalam pembinaan guru muatan lokal?
 - d. Sejahteramana usaha kepala sekolah dalam meningkatkan keterampilan mengajarkan muatan lokal?
 - e. Sejahteramana usaha kepala sekolah dalam meningkatkan penguasaan materi muatan lokal?
 - f. Sejahteramana usaha kepala sekolah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat/orang tua untuk kelancaran kurikulum muatan lokal?
3. Adakah hubungan antara kinerja guru dengan usaha kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum muatan lokal?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini ialah untuk mengetahui kinerja guru dalam mengimplementasikan kurikulum muatan lokal di SLTP Negeri Kabupaten Majalengka.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memperoleh gambaran tentang kinerja guru di SLTP Negeri Kabupaten Majalengka dalam mengimplementasikan kurikulum muatan lokal.

- b. Untuk memperoleh gambaran tentang usaha kepala sekolah di SLTP Negeri Kabupaten Majalengka dalam menunjang implementasi kurikulum muatan lokal.
- c. Untuk memperoleh gambaran hubungan antara kinerja guru dengan usaha kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum muatan lokal di SLTP Negeri Kabupaten Majalengka.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu yang berhubungan dengan implementasi kurikulum.
- b. Menemukan konsep dan prinsip dalam penyempurnaan kurikulum muatan lokal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengambil Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

b. Bagi Pengawas

Dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan pembinaan profesional guru muatan lokal.

c. Bagi Kepala Sekolah

Dapat dijadikan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

d. Bagi Guru

Sebagai cermin dalam melakukan perbaikan penyempurnaan pelaksanaan pengajaran.

e. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan bacaan studi banding dalam kajian implementasi kurikulum muatan lokal.

f. Bagi Peneliti Berikutnya

Merekomendasikan untuk meneliti aspek lain yang terdapat dalam perumusan masalah yang belum diteliti, dengan ruang lingkup yang lebih luas dalam mata pelajaran lain sesuai dengan minat anda.

